



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Tsk Korupsi, Mantan Direktur PDAM Belum Ditahan

CURUP - Proses hukum terkait penghasilan Direktur PDAM Tirta Dharma (sekarang Perumda Air Minum Bukit Kaba) yang diduga tanpa SK Bupati tahun 2018/2019 sudah naik status dari penyelidikan menjadi penyidikan sejak Maret 2021 lalu. Bahkan Oktober 2021 penyidik sudah menerima hasil perhitungan kerugian negara yang nilainya lebih dari Rp 400 juta.

Informasi terbaru, penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Rejang Lebong (RL) sudah menetapkan status tersangka terhadap mantan Direktur PDAM Tirta Dharma, OR. Bahkan penyidik sudah memeriksa OR sebagai tersangka meskipun belum melakukan penahanan. Dan melimpahkan Berkas Perkara (BP) nya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) RL.

Namun OR tidak ditahan oleh penyidik. Karena OR selama proses penyidikan bersikap kooperatif. Kemudian OR merupakan ibu rumah tangga.

"Benar, kita sudah menetapkan OR sebagai tersangka dan kita sudah menuntaskan Berkas perkaranya sekaligus melakukan pelimpahan tahap satu ke Kejari Rejang Lebong. Kita tinggal menunggu apakah nanti masih ada kekurangan dan dinyatakan P19 atau sebaliknya dinyatakan

kan lengkap alias P21. Tunggu saja perkembangan selanjutnya," singkat Kapolres RL AKBP Tonny Kurniawan, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP Sampson Sosa Hutapea, S.IK kepada RB.

Sayangnya, nomor WhatsApp mantan Direktur PDAM OR yang biasa dihubungi hingga tadi malam seperti tidak aktif. Dan informasinya OR sudah pulang ke Pulau Jawa pasca penyelesaian laporan pertanggungjawaban selama menjabat sebagai Direktur PDAM. Sejak menjabat hingga berakhir masa jabatan pada awal tahun 2022 lalu.

Untuk diketahui, masa jabatan Direktur PDAM Tirta Dharma yang

sekarang berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bukit Kaba, OR sudah berakhir sejak Februari 2022. OR menjadi direktur sejak tahun 2018 silam atau lebih kurang selama empat tahun.

Saat menjabat sebagai Direktur PDAM, OR memang sempat beberapa kali dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), baik ke Kejari RL maupun ke Polres RL. Hal ini tidak lain terkait beberapa kebijakan keuangan di perusahaan yang dipimpinnya tersebut. Yang salah satunya soal penghasilan Direktur yang diduga tanpa SK Bupati tahun 2018/2019.(dtk)